

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Implementasi kebijakan adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka membawa kebijakan kepada penerima kebijakan sehingga kebijakan tersebut dapat menghasilkan hasil sebagaimana yang diharapkan sebelumnya (Gaffar, 2009). Implementasi kebijakan merupakan kajian tentang pelaksanaan sebuah kebijakan publik yang mana dalam proses pembuatan kebijakan publik itu melalui tahapan perumusan dan diakhiri dengan persetujuan, langkah berikutnya adalah bagaimana agar kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan dan sasaran. Implementasi dari suatu kebijakan melibatkan *policy maker* (pembuat keputusan) untuk mempengaruhi birokrat pelaksana agar bersedia melaksanakan kebijakan dengan memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran kebijakan (Subarsono, 2013).

Pencemaran lingkungan merupakan suatu keadaan dimana kondisi asal yang telah berubah menjadi kondisi yang buruk akibat adanya bahan-bahan polutan yang ikut tercampur (Palar, 2008). Lingkungan dapat dikatakan telah tercemar apabila tatanan lingkungan yang sudah berubah tidak sama lagi dengan bentuk asalnya, hal tersebut akibat dari masuknya suatu zat berbahaya yang masuk ke dalam tatanan lingkungan. Kondisi ini mengakibatkan dampak buruk terhadap makhluk hidup yang ada, lebih

lanjut pencemaran lingkungan tersebut dapat membunuh bahkan menghapuskan suatu makhluk hidup.

Pencemaran lingkungan berdasarkan tempat terjadinya dapat dibagi menjadi pencemaran udara, tanah dan air (Sastrawijaya, 2009). Pencemaran air adalah masuknya bahan pencemar ke dalam air yang mengakibatkan berubahnya tatanan air sehingga kualitas air menurun pada tingkat tertentu yang mengakibatkan disfungsi air tidak lagi sesuai dengan peruntukannya, secara garis besar pencemaran air disebabkan oleh pembuangan limbah-limbah cair dan limbah padat yang dibuang ke media air, baik itu laut, sungai, maupun kali (Sulistyorini, 2009).

Limbah cair (*waste water*) merupakan buangan yang bersifat kotor yang berasal dari rumah tangga dan juga berasal dari industri, air tanah, air permukaan serta buangan lainnya, dengan demikian air buangan tersebut merupakan sesuatu yang bersifat kotoran umum (Sugiharto, 2014). Limbah air hotel adalah limbah dalam bentuk cair yang dihasilkan oleh kegiatan hotel yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan (Martono, 2004).

Kebutuhan akan air cenderung semakin meningkat dari waktu ke waktu, baik guna memenuhi kebutuhan dasar manusia maupun untuk sumber daya yang diperlukan dalam pembangunan ekonomi seperti kegiatan pertanian, industri dan pariwisata dimana sebagian besar air yang digunakan adalah sumber air permukaan, khususnya air sungai, sementara ketersediaan sumber daya air sungai cenderung semakin menurun kuantitas

dan kualitasnya, hal ini terjadi dikarenakan semakin langkanya *catchment area* (daerah tangkapan air) dan adanya pencemaran air di sungai (Aulia, 2014).

Sungai dapat dilihat sebagai sebuah sistem alami yang menjadi tempat berlangsungnya proses-proses biofisik hidrologis maupun kegiatan sosial-ekonomi dan budaya masyarakat yang kompleks sehingga pencemaran air di sungai dapat menyebabkan dampak yang sangat besar.

Pencemaran air di sungai-sungai DIY sangat memprihatinkan, berdasarkan pantauan dan penelitian yang dilakukan (Yuliana, 2012), kondisi Sungai Code, Sungai Winongo, dan Sungai Gajah Wong terlihat kotor dan tercemar limbah, tercium aroma sampah yang menyengat, air sungai tampak keruh berwarna hijau kehitaman, dan agak sedikit berbusa. Kemudian lebih lanjut pemantauan tersebut kemudian diteliti sehingga mendapatkan hasil bahwa kualitas air sungai berada di atas ambang batas yang telah ditetapkan, terutama pencemaran *Biological Oxygen Demand* (BOD), dan *Chemical Oxygen Demand* (COD).

Berdasarkan data jumlah dan jenis sumber pencemar daerah aliran sungai diketahui bahwa kegiatan perekonomian merupakan penyebab utama pencemaran sungai, hotel merupakan salah satu sumber pencemar dengan jumlah terbanyak dibanding jenis sumber pencemar yang lain. Adapun rincian jenis sumber pencemar di DAS DIY dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini: (BLH, 2015)

Tabel 1.1
Jenis Sumber Pencemar DAS

No.	Jenis Sumber Pencemar	Jumlah	Parameter Pencemar
1.	Pelayanan Kesehatan	62	BOD, COD, TSS, NH ₃ , PO ₄ , Minyak, Deterjen, Phenol, pH, Mikrobiologi, Radioaktivitas.
2.	Industri Otomotif/Karoseri	133	BOD, COD, TSS, TDS, Konduktivitas, Minyak Bumi, pH.
3.	Industri Batik	11	BOD, COD, TSS, TDS, Minyak Bumi, Konduktivitas, pH.
4.	Industri Percetakan	38	TDS, TSS, COD, BOD, pH, Konduktivitas, Pb, Cd, Cr, Hg, Se, NH ₁ , Deterjen
5.	Industri Kulit	6	BOD, COD, TDS, TSS, Cr, NH ₁ -N, N ₁ S, Deterjen, Minyak&Lemak Nabati, Minyak Bumi, pH.
6.	Laundry	45	BOD, COD, TSS, TDS, Deterjen, Konduktivitas, pH.
7.	Hotel Berbintang dan Melati	204	COD, TDS, BOD, TSS, Deterjen, PO ₄ , Minyak, Lemak Nabati, pH.

Sumber: (BLH, 2015)

Tingginya pencemaran di Sungai Code tersebut merupakan salah satu implikasi dari pembangunan yang terus meningkat di DIY. Meningkatnya pembangunan di DIY tidak terlepas dari perkembangan sektor pariwisata. Sektor pariwisata telah berkembang dengan sangat pesat, terlihat dari peningkatan jumlah kunjungan wisatawan baik domestik dan manca negara. Dari data jumlah wisatawan yang berkunjung ke DIY pada tahun 2016 berjumlah 21.445.343 orang mengalami kenaikan hampir dua kali lipat dibanding tahun 2012 yang berjumlah 11.379.640 orang (Dispar, 2016). Perkembangan di sektor pariwisata yang sangat pesat di DIY menyebabkan meningkatnya aktivitas di segala bidang khususnya bidang ekonomi (Bahrudin, 2015).

Tingginya jumlah jenis sumber pencemar yang berasal dari limbah cair hotel tersebut berbanding lurus dengan jumlah hotel yang ada di DIY.

Perkembangan sektor pariwisata yang pesat mendorong para investor untuk berinvestasi melalui usaha-usaha kepariwisataan khususnya hotel. Jumlah hotel berbintang di DIY pada tahun 2016 sebanyak 96 unit dengan rincian 1 unit di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul, 32 unit di Kabupaten Sleman, dan 62 unit di Kota Yogyakarta (BPS, 2017). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Kota Yogyakarta merupakan daerah yang memiliki jumlah hotel terbanyak dibanding daerah kabupaten yang lain di DIY, kemudian dari tabel berikut ini maka dapat diketahui peningkatan jumlah hotel berbintang mulai marak terjadi sejak tahun 2012.

Tabel 1.2
Jumlah Akomodasi Hotel, Kamar dan Tempat Tidur di DIY 2010-2016

Tahun	Hotel Berbintang	Hotel Non Berbintang
2012	37	360
2013	43	357
2014	57	362
2015	59	354
2016	62	365

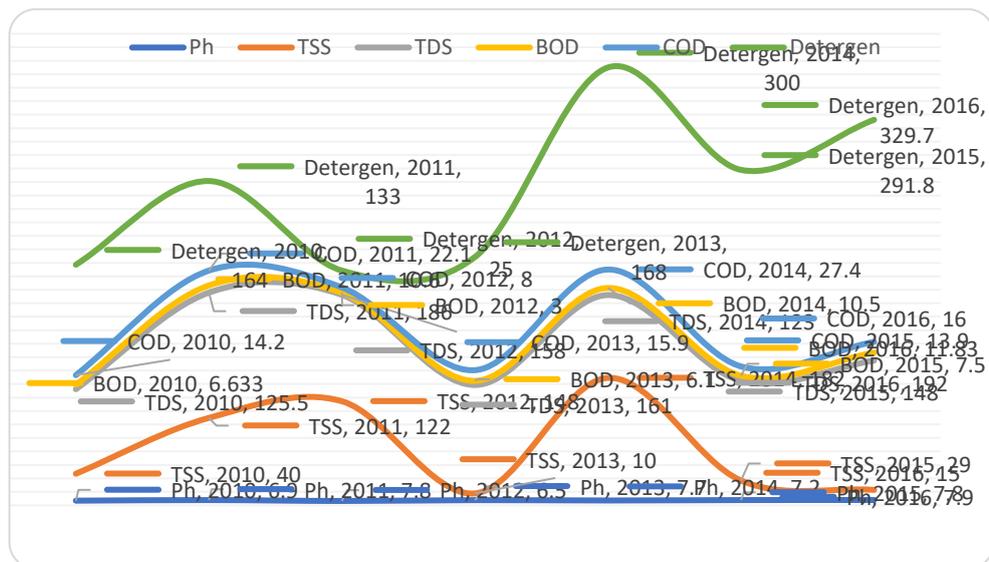
Sumber: (BPS, 2017)

Pertumbuhan jumlah hotel yang terus mengalami kenaikan memberikan dampak buruk bagi lingkungan terutama sungai, dikarenakan limbah-limbah dari kegiatan perhotelan tersebut dibuang ke sungai, walaupun setiap hotel diwajibkan memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) akan tetapi jumlah limbah cair hotel yang dibuang ke sungai

sangat lah besar hal ini akan tetap menimbulkan pencemaran sungai, apalagi jumlah hotel yang kian bertambah (WALHI, 2014).

Pengolahan limbah cair hotel di Daerah Istimewa Yogyakarta diatur dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 7 tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah. Peraturan tersebut mengatur tentang baku mutu air limbah berdasarkan jenis kegiatan yang menghasilkan limbah cair serta parameter bahan pencemar yang masing masing memiliki ambang batas maksimal pencemaran.

Grafik 1.1
Grafik Bahan Pencemar Sungai Code 2010-2016



Sumber: (DLH, 2016), diolah

Berdasarkan grafik bahan pencemar Sungai Code tahun 2010-2016 menunjukkan bahwa bahan pencemar yang mencemari Sungai Code cenderung turun naik. Bahan pencemar pada tahun 2011 mengalami kenaikan dan pada tahun berikutnya mengalami penurunan yang kemudian disusul dengan penurunan pada tahun 2013, kemudian mengalami kenaikan

yang drastis pada tahun 2014, kemudian menurun lagi pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 bahan pencemar berupa Detergen, COD, BOD dan TDS mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Berdasarkan data bahan pencemar tersebut ada beberapa bahan pencemar yang tidak sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan seperti TSS yang melebihi batas baku mutu terjadi pada tahun 2011, 2012 dan 2014, BOD yang melebihi batas baku mutu terjadi sepanjang tahun 2010 sampai tahun 2016, dimana pada tahun 2016 pencemaran BOD mengalami kenaikan hampir 4 kali lipat dari batas BOD yang telah ditetapkan, kemudian Detergen yang melebihi batas baku mutu yang terjadi pada tahun 2014, 2015 dan 2016. Adapun data kualitas sungai Code selengkapnya tahun 2010-2016 sebagai berikut: (DLH, 2016)

Tabel 1.3
Data Bahan Pencemar Sungai Code 2010-2016

Parameter	Batas	Tahun						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ph	6-8.5	6.9	7.8	6.5	7.7	7.2	7.8	7.9
TSS	50	40	122*	148*	10	182*	29	15
TDS	1000	125.5	186	158	161	123	148	192
BOD	3	6.633*	10.6*	3	6.1*	10.5*	7.5*	11.83*
COD	25	14.2	22.1	8	15.9	27.4*	13.9	16
Detergen	200	164	133	25	168	300*	291.8*	329.7*

Sumber: (DLH, 2016), diolah

*(Tidak memenuhi baku mutu)

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas limbah cair hotel di Yogyakarta melewati syarat baku mutu yang telah ditetapkan,

hal tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan (Bahruddin, 2015), yang melakukan pengujian kualitas limbah cair di beberapa hotel berbintang di kawasan Kota Yogyakarta dengan menggunakan sampel limbah yang kemudian di uji di laboratorium hidrologi dan kualitas air Fakultas Geologi UGM Yogyakarta. Adapun hasil penelitian tersebut menunjukkan parameter bahan pencemar BOD pada hotel berbintang ada yang mencapai angka 12,7 g/L, untuk COD sangat tinggi ada yang mencapai 38.3 g/L dan TSS ada yang mencapai 85 g/L.

Kondisi IPAL di beberapa hotel di Kota Yogyakarta tidak bekerja secara maksimal dikarenakan beban limbah yang terlalu banyak (*overload*) dan pengendapan limbah yang tidak sempurna sehingga mengakibatkan penyaringan limbah menjadi tidak maksimal, akibatnya zat-zat berbahaya dari limbah cair hotel tersebut mencemari sungai (Bahruddin, 2015).

Tingginya angka pencemaran yang berasal dari limbah cair hotel dikarenakan masih banyaknya pihak manajemen hotel yang belum mengelola limbah cair secara tepat dan benar serta lambannya birokrasi menangani masalah yang rutin terjadi (Purnomo, 2016). Hotel yang beroperasi diwajibkan memiliki IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) yang harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Limbah cair yang telah melalui IPAL diperbolehkan dibuang ke media lingkungan seperti sungai atau kali dengan izin tertulis dari Walikota dan telah memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan.

Secara umum kebijakan untuk mengendalikan pencemaran yang diakibatkan limbah cair hotel diatur di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalam peraturan tersebut upaya yang dilakukan dengan melalui kebijakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, program pengawasan dan pembinaan.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta selaku pelaksana teknis kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup memiliki peranan penting dalam mengimplementasikan kebijakan pengendalian limbah cair hotel. Oleh karena itu penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui implementasi kebijakan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam mengendalikan limbah cair hotel di Kota Yogyakarta tahun 2017 dan untuk melengkapinya penelitian ini juga mencoba menggali secara kritis faktor-faktor apa saja yang menghambat Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam melakukan pengendalian limbah cair hotel di Kota Yogyakarta.

1.2. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

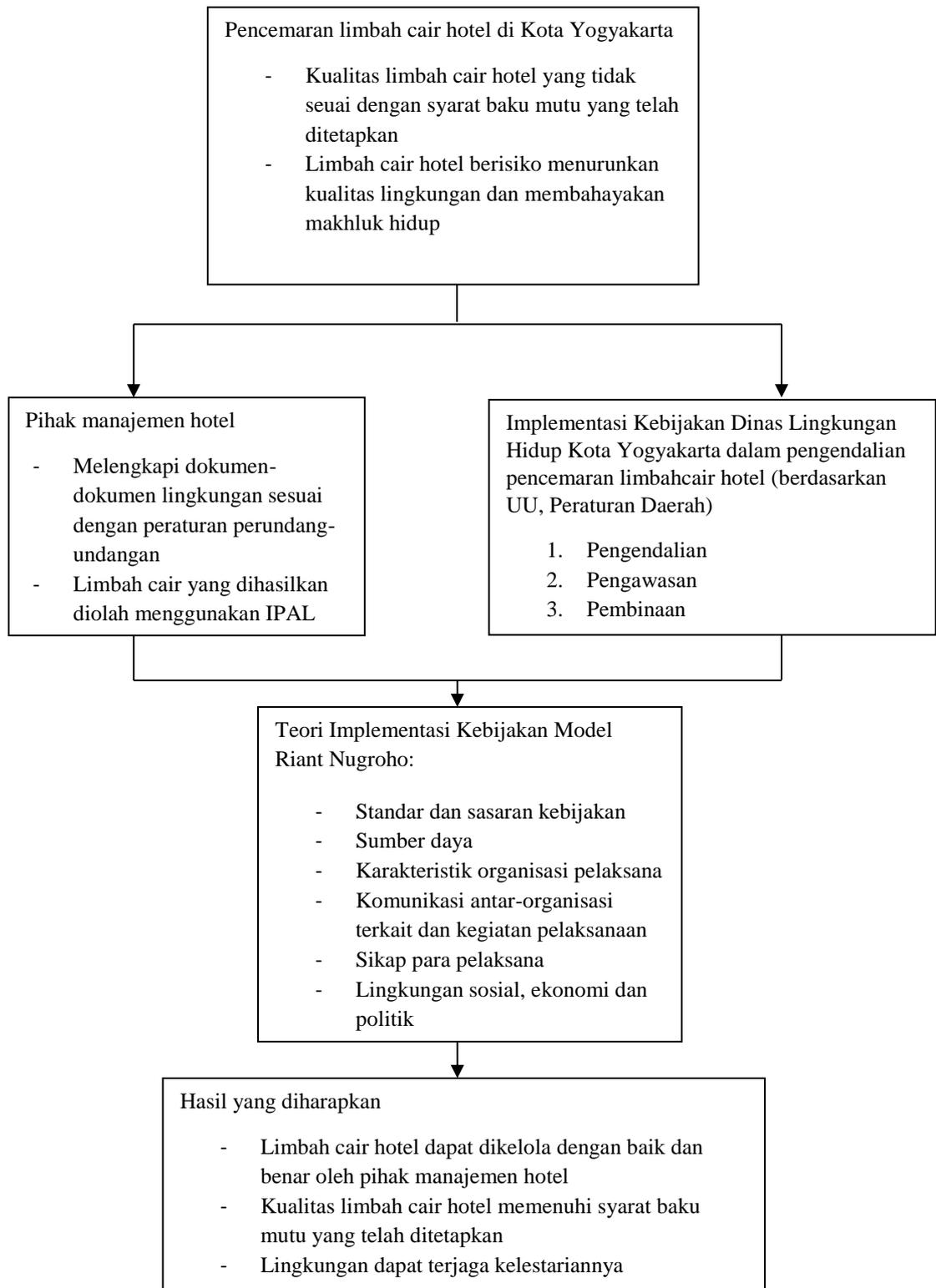
1. Adanya pencemaran di daerah aliran sungai kota Yogyakarta yang berpotensi merusak lingkungan.

2. Semakin banyak hotel yang berdiri di kota Yogyakarta yang secara tidak langsung mengakibatkan meningkatnya jumlah limbah.
3. Kualitas limbah cair yang dihasilkan sebagian hotel belum memenuhi syarat baku mutu yang telah ditetapkan pemerintah.
4. Kualitas limbah cair yang tidak sesuai baku mutu berpotensi merusak lingkungan dan berbahaya bagi makhluk hidup.
5. Masih adanya pihak manajemen hotel yang belum tepat dalam mengelola limbah cair.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah maka selanjutnya adalah melakukan pembatasan masalah agar penelitian ini terfokus dan terarah tidak menyimpang dari pada masalah utama. Oleh sebab itu di dalam penulisan penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian pada masalah utama yaitu mengenai implementasi kebijakan pengendalian pencemaran limbah cair hotel di Kota Yogyakarta tahun 2017.

1.3.Kerangka Pemikiran



1.4.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.4.1. Bagaimana implementasi kebijakan pengendalian pencemaran limbah cair hotel di Kota Yogyakarta pada tahun 2017 ?

1.5.Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan yang ingin didapatkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mendeskripsikan implementasi kebijakan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam pengendalian limbah cair hotel di Kota Yogyakarta tahun 2017

1.5.2. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis bagi perkembangan ilmu dan kajian strategi kebijakan pemerintah dalam melaksanakan pengendalian limbah cair.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Yogyakarta

dalam rangka mengkaji dan membenahi proses strategi pengendalian limbah cair hotel.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini dilakukan guna menyelesaikan tugas akhir skripsi sebagai persyaratan mendapat Gelar Sarjana pada program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

1.6. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan (Sudarno, 2012) yang berjudul Analisis Kualitas Air dan Strategi Pengendalian Pencemaran Air Sungai Blukar Kabupaten Kendal.

Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis kualitas air Sungai Blukar berdasarkan baku mutu kualitas air sungai menurut PP No 82 Tahun 2001 dan merumuskan prioritas strategi pengendalian pencemaran air sungai yang perlu dilakukan. Berdasarkan penelitian tersebut diketahui air Sungai Blukar telah tercemar dengan status cemar ringan, kemudian adapun strategi yang diperlukan untuk mengendalikan pencemaran adalah dengan melalui peningkatan peran masyarakat baik umum, petani maupun industri, peningkatan koordinasi antar instansi yang terkait dengan pengendalian pencemaran air khususnya Badan Lingkungan Hidup setempat, serta mengintegrasikan kebijakan pengendalian pencemaran air dalam penataan ruang.

Penelitian tersebut relevan dengan penelitian penulis dikarenakan fokus penelitian yang sama yaitu strategi pengendalian pencemaran. Adapun perbedaan penelitian tersebut terletak pada objek yang manadalam penelitian Sudarno memfokuskan air sungai sebagai objeknya sedangkan objek penelitian yang akan penulis teliti ialah limbah cair hotel.

2. Penelitian yang berjudul “Partisipasi Hotel Dalam Pengelolaan Lingkungan di Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar Bali” yang dilakukan oleh (Lensiana, 2010).

Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui tingkat partisipasi para manajemen hotel dalam upaya pengolahan limbah cair dan untuk mengetahui tingkat efektivitas pengolahan limbah cair hotel. Penelitian dilakukan di Kecamatan Ubud, Gianyar Bali pada tahun 2010 dengan melibatkan 16 pengusaha hotel. Pengumpulan data dilakukan dengan kuisisioner dan uji kualitas limbah cair yang dihasilkan tiap-tiap hotel, kemudian dari data tersebut dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan tingkat partisipasi para manajemen hotel dalam upaya pengolahan limbah cair hotel masih rendah dan tingkat efektivitas pengolahan limbah cair hotel masih belum optimal, hal tersebut dikarenakan oleh teknologi dan langkah-langkah pengolahan limbah yang di terapkan cenderung menggunakan teknologi resapan.

Penelitian tersebut relevan dengan penelitian penulis dikarenakan objek penelitian yang sama, yaitu membahas tentang limbah cair hotel. Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian H.J Lensiana yaitu terletak di fokus penelitian, dimana fokus penelitian yang dilakukan H.J

Lensiana ialah partisipasi para pengusaha hotel yang ada di Kecamatan Ubud dalam upaya pengolahan limbah cair hotel dan tingkat efektivitas pengolahan limbah cair hotel, sedangkan fokus penelitian peneliti adalah strategi pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya pengendalian limbah cair hotel.

3. Penelitian yang berjudul Monitoring Kebijakan Pengelolaan Limbah Cair Kota Yogyakarta Tahun 2015 (Studi kasus : Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta) yang dilakukan oleh (Laksita, 2015).

Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mendeskripsikan proses monitoring yang dilakukan oleh DLH Kota Yogyakarta terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan limbah cair hotel di Kota Yogyakarta tahun 2015, mendeskripsikan pengelolaan limbah cair hotel di Kota Yogyakarta oleh DLH Kota Yogyakarta tahun 2015, mengetahui faktor apa saja yang menghambat proses monitoring DLH Kota Yogyakarta terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan limbah cair hotel. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu teknik analisis dengan mode analisis kualitatif. Kemudian hasil penelitian tersebut diketahui bahwa proses monitoring kebijakan pengelolaan limbah cair hotel oleh Dinas lingkungan Hidup Kota Yogyakarta belum optimal dikarenakan kualitas limbah cair pada beberapa hotel diatas ambang batas baku mutu yang telah ditetapkan. Beberapa hotel yang belum dimonitoring dikhawatirkan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan yang lebih besar. Sampai saat ini sanksi terhadap hotel yang melanggar masih berupa sanksi yang tingkatnya sedang, dikarenakan hotel yang melanggar masih dapat terlepas

dari sanksi administratif yang menjeratnya jika melakukan perbaikan, sehingga tidak sampai pada sanksi pencabutan dan pembekuan izin lingkungan. Belum maksimalnya proses monitoring yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam pengelolaan limbah cair hotel juga terjadi karena kurangnya sumber daya pengawas atau belum adanya pejabat khusus pengawas lingkungan hidup atau PPLH sehingga otoritas pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tidak kuat. Dalam proses monitoring, hal ini perlu diperhatikan terutama untuk pengawasan lapangan secara berkelanjutan.

Penelitian tersebut relevan dengan penelitian penulis dikarenakan objek penelitian yang sama, yaitu membahas tentang limbah cair hotel. Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Cahyaningtyas Laksita yaitu terletak di fokus penelitian, dimana fokus penelitian yang dilakukan Cahyaningtyas Laksita ialah monitoring kebijakan pengelolaan limbah cair hotel, sedangkan fokus penelitian peneliti adalah strategi pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya pengendalian limbah cair hotel.

4. Penelitian yang dilakukan oleh (Hardjanto, 2016) yang berjudul Pelaksanaan Tugas Badan Lingkungan Daerah dalam Bidang Pengawasan dan Pengendalian Limbah Cair di Kabupaten Tangerang Menurut UU 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan industri di Kabupaten Tangerang yang diikuti dengan peningkatan permasalahan lingkungan utamanya pencemaran limbah cair. Dalam penelitiannya

menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji permasalahan limbah cair dari segi hukum, didasarkan dari UUPPLH dengan mendiskripsikan kegiatan BLH Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan dari pencemaran limbah cair. Kemudian berdasarkan penelitiannya tersebut diketahui bahwa BLH Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan tugas untuk mengatasi permasalahan limbah cair telah sesuai dengan aturan, akan tetapi masih kurangnya kesadaran dan pemahaman para pemilik industri terhadap bahaya limbah yang mereka hasilkan serta adanya penolakan terhadap para petugas BLH yang ingin melakukan pengawasan terhadap limbah.

Penelitian Hardjanto tersebut relevan dengan penelitian penulis dikarenakan objek penelitian yang sama, yaitu membahas tentang limbah cair. Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Hardjanto yaitu terletak di fokus penelitian, dimana fokus penelitian yang dilakukan adalah pelaksanaan tugas Badan Lingkungan Daerah dalam Bidang Pengawasan dan Pengendalian Limbah Cair di Kabupaten Tangerang, sedangkan fokus penelitian peneliti adalah strategi pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya pengendalian limbah cair hotel.

5. Penelitian yang berjudul “Efektivitas Pencapaian Baku Mutu Air pada Badan Air oleh kegiatan pembuangan limbah cair industry” yang dilakukan oleh (Ismanto, 2001).

Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui penerapan keputusan Gubernur DIY No. 214/KPTS 1991 tentang baku mutu lingkungan daerah untuk wilayah DIY, untuk mengetahui sejauh mana tahapan dari penerapan

keputusan gubernur tersebut. Penelitian tersebut dilakukan di Sungai Code yang meliputi Kab Sleman, Kota Yogyakarta dan Kab Bantul dengan menggunakan metode survei dengan pengambilan sample secara sengaja (*purposive*) dari sumber pencemaran yang potensial pada daerah sekitar Sungai Code. Pengumpulan data dilakukan melalui responden dari berbagai instansi yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup, dan dari data sekunder yaitu delapan kegiatan meliputi empat pabrik, dua rumah sakit dan dua hotel. Data yang dikumpulkan tersebut dianalisis dengan deksriptif kualitatif kemudian dapat diketahui bahwa penerapan dari keputusan Gubernur DIY No. 214/KPTS 1991 tentang baku mutu lingkungan daerah untuk wilayah DIY belum berjalan efektif secara umum, upaya dalam rangka untuk mencapai baku mutu limbah khususnya di Sungai Code belum dilakukan dan tidak mempunyai target yang jelas sampai kapan akan dilakukan. Dari penelitian ini juga dapat diketahui bahwa penerapan dari keputusan Gubernur tersebut oleh beberapa instansi masih ditanggapi secara ragu.

Penelitian yang dilakukan oleh Ismanto Nur tersebut relevan dengan penelitian penulis. Persamaan nya terletak di fokus penelitian yang mana sama sama membahas tentang kebijakan pemerintah yang terkait dengan permasalahan limbah cair. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Ismanto Nur terletak pada objek penelitiannya yang mana objek dalam penelitian tersebut adalah pencapaian baku mutu air pada badan air oleh kegiatan pembuangan limbah cair, sedangkan objek penelitian penulis adalah pencemaran limbah cair hotel.

1.7. Kerangka Dasar Teori

Kerangka teori merupakan landasan bagi sebuah penelitian yang akan dilakukan, landasan tersebut digunakan agar sebuah penelitian mempunyai dasar yang kokoh, dan sekedar bukan percoba-cobaan (*trial and error*), sehingga sumber bacaan merupakan dari penelitian yang essensial. Kerangka teori berguna menjadi titik tolak atau landasan berpikir dalam memecahkan atau menyoroti masalah (Suryabrata, 2010). Lebih lanjut fungsi kerangka teori digunakan untuk menerangkan, meramalkan, memprediksi, dan menemukan keterpautan fakta-fakta yang ada secara sistematis (Effendy, 2004). Menurut pengertian para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kerangka teori adalah sejumlah teori-teori yang teruji kebenarannya yang digunakan oleh seorang peneliti yang disusun secara sistematis. Seorang peneliti dituntut kemampuannya untuk mengaplikasikan pola berpikirnya melalui teori-teori tersebut, sehingga teori-teori yang diaplikasikan berfungsi untuk mendukung permasalahan penelitian.

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teori yang relevan dengan permasalahan strategi dalam pengendalian limbah cair hotel. Adapun deskripsi teori yang digunakan adalah teori konsep kebijakan publik, implementasi kebijakan, konsep pencemaran lingkungan dan konsep limbah cair.

1.7.1. Konsep Kebijakan Publik

1.7.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah setiap keputusan yang dibuat oleh negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara, kebijakan publik juga merupakan strategi untuk menghantar masyarakat pada masa awal, memasuki, masyarakat pada masa transisi untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan (Nugroho, 2017).

Kebijakan publik menurut Easton dalam (Santosa, 2008), adalah pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan dalam (Nugroho, 2017), juga mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah sehingga kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik sosial yang ada di masyarakat.

Eyestone dalam (Agustino, 2008), mengartikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Pendapat yang senada juga disampaikan oleh Woll dalam (Tangkilisan, 2003), yang menyebutkan bahwa kebijakan publik merupakan sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya berupa aktivitas-aktivitas semata, sebagaimana menurut Dye dalam (Islamy, 2009) yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*is whatever government choose to do or not to do*” yang berarti apapun

yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan, sehingga ketika pemerintah tidak melakukan sesuatu atau diam itu juga merupakan salah satu kebijakan. Pendapat yang senada diutarakan (Dunn, 2003), kebijakan publik sebagai pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Pengertian tersebut menegaskan bahwasanya kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan suatu kebijakan publik karena mempunyai pengaruh dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.

Kebijakan publik sebagai “*the autorative allocation of values for the whole society*”, yang berarti hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai (Agustino, 2008). Hal tersebut dikarenakan pemerintah termasuk ke dalam “*authorities in a political system*” yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab dalam segala sesuatu masalah dimana pada suatu titik mereka diminta untuk

mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Kebijakan publik mempunyai lingkup yang sangat luas karena mencakup berbagai sektor, seperti kebijakan publik di bidang pembangunan, pendidikan, perekonomian, pertanian, transportasi, kesehatan, pertahanan, pencemaran dan sebagainya (Subarsono, 2013). Selain itu kebijakan publik jika dilihat dari hirarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Propinsi, Peraturan Pemerintah Kabupaten/Kota, Keputusan Bupati/Walikota.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik dan untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa. Kebijakan publik tersebut berisi nilai-nilai yang harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat sehingga kebijakan publik harus mampu mengakomodir nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup di masyarakat, apabila tidak maka kebijakan publik yang diimplementasikan akan mendapatkan resistensi.

1.7.1.2 Jenis Kebijakan Publik

Menurut Anderson dalam (Islamy, 2009), kebijakan publik dapat dikelompokkan berdasarkan jenisnya, sebagai berikut:

a. *Substantive and Procedural Policies*

Substantive atau substansi adalah suatu kebijakan yang dilihat dari substansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah, seperti kebijakan pendidikan, kebijakan ekonomi, dan lain sebagainya. *Procedural policy* atau kebijakan prosdural yang dimaksud adalah suatu kebijakan yang dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dalam perumusannya (*policy stakeholders*). Meskipun dalam pembuatan suatu kebijakan publik ada instansi/organisasi pemerintah yang secara fungsional berwenang membuatnya, akan tetapi dalam pelaksanaan pembuatannya banyak instansi/organisasi lain yang ikut terlibat.

b. *Distributive, Retributive, and Regulatory Policies*

Distributive atau distribusi adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan atau keuntungan kepada individu-individu, kelompok-kelompok, atau perusahaan-perusahaan. *Retributive* atau kebijakan retribusi adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan, kepemilikan, atau hak-hak. Contohnya adalah kebijakan tentang pembebasan tanah untuk kepentingan umum. Sedangkan *regulatory policy* atau kebijakan mengatur adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pembatasan atau pelarangan terhadap perbuatan atau tindakan. Contohnya adalah kebijakan tentang

larangan memiliki dan menggunakan senjata api, pembatasan baku mutu limbah yang bertujuan untuk mengendalikan pencemaran.

c. *Material Policy*

Material policy atau kebijakan material adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pengalokasian/penyediaan sumber-sumber material yang nyata bagi penerimanya.

d. *Public Goods and Private Goods*

Policies Public goods policy atau kebijakan khalayak umum adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang atau pelayanan-pelayanan oleh pemerintah, untuk kepentingan orang banyak. Contohnya kebijakan tentang perlindungan keamanan dan penyediaan jalan umum. *Private goods policy* atau kebijakan publik swasta adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang atau pelayanan-pelayanan oleh pihak swasta, untuk kepentingan individu-individu (perorangan) di pasar bebas dengan imbalan. Contohnya kebijakan pengadaan tempat hiburan, hotel, dan lain sebagainya.

Adapun dalam penelitian ini akan mengkaji kebijakan pengendalian pencemaran limbah cair hotel di Kota Yogyakarta . Kebijakan tersebut merupakan kebijakan publik yang bersifat substansi karena dilihat dari masalah utama yaitu pencemaran lingkungan. Menurut (Akib, 2010), kebijakan lingkungan merupakan

tindakan yang dilakukan maupun tidak dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu di bidang lingkungan, serta bagaimana cara dan dengan sarana apa pemerintahan dalam melakukan pengelolaan di bidang lingkungan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

1.7.2. Implementasi Kebijakan Publik

1.7.2.1 Pengertian

Implementasi adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka membawa kebijakan kepada penerima kebijakan sehingga kebijakan tersebut dapat menghasilkan hasil sebagaimana yang diharapkan sebelumnya (Gaffar, 2009) Rangkaian kegiatan yang dimaksud mencakup seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut, misalnya dari Undang-Undang yang memunculkan sejumlah Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan sebagainya. Kemudian rangkaian tersebut diimplementasikan oleh instansi yang diberi kewenangan yang secara penuh bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut.

Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, yang mana dalam pelaksanaan kebijakannya melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran dari kebijakan publik. Implementasi kebijakan merupakan kajian tentang pelaksanaan sebuah kebijakan publik itu sendiri yang mana dalam proses pembuatan kebijakan publik melalui tahapan perumusan dan diakhiri dengan persetujuan, langkah berikutnya adalah bagaimana

agar kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan dan sasaran. Implementasi dari suatu kebijakan melibatkan *policy maker* (pembuat keputusan) untuk mempengaruhi birokrat pelaksana agar bersedia melaksanakan kebijakan dengan memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran kebijakan (Subarsono, 2013).

Untuk kebijakan yang bersifat mikro, implementasi hanya melibatkan satu badan atau instansi yang bertugas sebagai implementator, sedangkan untuk kebijakan yang bersifat makro, misalnya kebijakan pengurangan kemiskinan di pedesaan, maka usaha implementasi akan melibatkan berbagai badan atau instansi (Subarsono, 2013).

Suatu kebijakan tidak selalu dapat dilaksanakan dengan lancar ataupun sesuai dengan tujuan dan sasaran. Menurut (Agustino, 2008), ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan, yaitu faktor penentu pemenuhan kebijakan dan faktor penentu penolakan atau penundaan kebijakan. Faktor pemenuhan kebijakan terdiri atas kepatuhan anggota masyarakat pada otoritas dan kepuasan pemerintah, adanya kesadaran untuk menerima kebijakan, adanya sanksi hukum, adanya kepentingan publik, adanya kepentingan publik dan masalah waktu. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor penentu penolakan atau penundaan kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada, tidak ada kepastian hukum, adanya keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi, serta adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum.

Kebijakan yang telah dibuat dengan sebaik-baiknya dan direkomendasikan oleh *policy maker* (pembuat keputusan) bukanlah jaminan sebuah kebijakan pasti berhasil dalam pengimplementasiannya. Kompleksitas implementasi bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya aktor atau unit organisasi yang terlibat, akan tetapi dikarenakan proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks, baik variabel yang individual maupun variabel organisasional, dan masing-masing variabel pengaruh tersebut juga saling berinteraksi satu sama yang lain (Subarsono, 2013).

Berdasarkan pemaparan para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah hasil sebuah perumusan masalah yang dilaksanakan oleh birokrat yang berwenang melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan kepada penerima kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang dibuat oleh pembuat kebijakan.

1.7.2.2 Model Implementasi Kebijakan

Kebijakan publik pada dasarnya diciptakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat dengan maksud dan tujuan tertentu. Tujuan dari kebijakan tidak akan tercapai jika kebijakan tidak dilaksanakan dengan baik. Suatu proses implementasi kebijakan akan berbeda-beda tergantung pada sifat kebijakan yang

dilaksanakan (Winarno, 2014). Macam-macam keputusan yang berbeda akan menunjukkan karakteristik, struktur-struktur dan hubungan-hubungan antara faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan publik sehingga proses implementasi juga akan mengalami perbedaan. Dalam mengimplementasikan kebijakan ada berbagai model implementasi kebijakan yang bisa digunakan, akan tetapi dari tiap model implementasi kebijakan tidak ada pilihan model yang terbaik. Menurut (Nugroho, 2017) dalam memilih model implementasi kebijakan akan lebih bijaksana jika dilakukan dengan melihat kebutuhan dari sisi kebijakannya sendiri.

Pada dasarnya model implementasi kebijakan dapat dikelompokkan atau dilakukan pemetaan model-model implementasi kebijakan ke dalam dua jenis pemilahan (Nugroho, 2017). Pemilahan yang pertama adalah implementasi yang memiliki pola “dari atas ke bawah” (*top-downer*) dan “bawah ke atas” (*bottom-upper*). Kedua adalah pemilahan implementasi yang memiliki pola paksa (*enforced mechanism; command-and control*) dan mekanisme pasar (*market mechanism; economic incentives*). Untuk memperjelas model-model implementasi kebijakan, akan dipaparkan berikut ini: (Nugroho, 2017)

a. Pemilahan berdasarkan *top-downer* dan *bottom-upper*

Model *top-downer* bermakna pola yang dikerjakan oleh pemerintah untuk rakyat, dan partisipasi yang berbentuk mobilisasi. Sedangkan model *bottom-upper* bermakna meskipun

kebijakan dibuat oleh pemerintah akan tetapi pelaksanaan oleh rakyat, dimana adanya sebuah interaksi pelaksanaan diantara pemerintah dan rakyat.

b. Pemilihan berdasarkan pola paksa dan mekanisme pasar

Model mekanisme paksa bermakna model yang mengedepankan arti penting sebuah lembaga publik sebagai lembaga tunggal yang mempunyai monopoli atas mekanisme paksa pada negara yang tidak memiliki mekanisme insentif bagi yang melaksanakan, namun ada sanksi bagi yang menolak atau melanggarnya. Sedangkan mekanisme pasar adalah model yang mengedepankan insentif bagi yang menjalani dan bagi yang tidak menjalani atau melanggar tidak mendapatkan sanksi dan tidak mendapatkan insentif.

Terdapatnya perbedaan faktor-faktor atau variabel yang tercakup dan dapat mempengaruhi dalam proses implementasi. Sehingga keberhasilan sebuah implementasi kebijakan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling mempengaruhi satu sama yang lain. Dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik model Riant Nugroho (2017). Model ini merupakan adopsi dari teori implementasi kebijakan yang dicetuskan oleh Van Meter dan Van Horn yang kemudian dikembangkan oleh Riant Nugroho. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik.

Berikut ini adalah variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik, yaitu: (Nugroho, 2017).

1. Standar dan sasaran kebijakan

Para pelaksana kebijakan/implementator memahami standar dan tujuan kebijakan karena standar dan tujuan kebijakan berhubungan dengan sikap para pelaksana. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas terukur sehingga dapat direalisasikan, apabila tidak jelas maka menimbulkan multiinterpretasi dan menimbulkan konflik di antara para pelaksana kebijakan.

2. Sumber daya

Implementasi kebijakan memerlukan dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia (*human*) dan sumber daya non-manusia (*non-human*). Pelaksana kebijakan memanfaatkan sumber daya yang tersedia seperti SDM, sarana prasarana, anggaran dan waktu.

3. Karakteristik organisasi pelaksana

Pelaksana kebijakan mengetahui apa yang dilakukan dan mempunyai sumber-sumber dalam mengimplementasikan kebijakan, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat hambatan yang dapat berupa struktur-struktur organisasi. Agar implementasi kebijakan dapat terlaksana dengan efektif, para pelaksana kebijakan harus memahami prosedur standar operasional (SOP), dan menghindari fragmentasi yang mana menjadikan proses implementasi menjadi tidak efektif.

4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tau apa yang harus dilakukan. Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh komunikasi yang akurat dan konsisten kepada para pelaksana kebijakan, serta koordinasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

5. Sikap para pelaksana implementasi/disposisi

Watak dan karakteristik yang dimiliki pelaksana implementasi mempengaruhi pelaksana implementasi itu sendiri untuk menerima atau menolak suatu kebijakan. Hal tersebut bergantung pada pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan pelaksana implementasi kebijakan baik pribadi maupun organisasinya. Apabila pelaksana implementasi memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan efektif sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri

6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Variabel ini mencakup lingkungan eksternal yang berupa kondisitivitas lingkungan sosial, ekonomi, politik yang dapat mendukung atau tidak mendukung suatu proses implementasi kebijakan serta karakteristik partisipan implementasi kebijakan yang mendukung atau menolak.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan Riant Nugroho karena relevan dengan kajian yang akan

diteliti. Model pendekatan tersebut menggunakan enam variabel dalam mengimplementasikan kebijakan yang mana menurut peneliti model pendekatan tersebut dapat menjawab tujuan penelitian ini.

1.7.3 Eksternalitas

1.7.3.1 Pengertian

Menurut (Daraba, 2001) eksternalitas merupakan dampak dari suatu tindakan pihak tertentu kepada pihak lain baik dampak yang menguntungkan atau yang merugikan. Eksternalitas terjadi apabila tindakan seseorang menimbulkan dampak terhadap orang lain atau sekelompok orang tanpa ada kompensasi apapun sehingga timbul inefisiensi dalam alokasi faktor produksi. Eksternalitas timbul pada dasarnya karena aktivitas manusia yang tidak mengikuti prinsip-prinsip ekonomi yang berwawasan lingkungan

1.7.3.2 Jenis Eksternalitas

Bila ditinjau dari dampaknya menurut (Daraba, 2001), eksternalitas dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Eksternalitas positif adalah dampak yang menguntungkan pihak lain tanpa adanya kompensasi dari pihak yang diuntungkan. Sedangkan eksternalitas negatif adalah dampak dari suatu kegiatan yang merugikan pihak lain tanpa adanya kompensasi dari pihak yang melaksanakan kegiatan

1.7.4 Pencemaran Lingkungan

1.7.4.1 Pengertian

Pencemaran lingkungan merupakan keadaan dimana lingkungan menjadi tidak sesuai lagi dengan kondisi awalnya, pencemaran lingkungan terjadi ketika daur materi dalam lingkungan hidup mengalami perubahan sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan dalam struktur maupun fungsinya (Faisal, 2010). Ketidakseimbangan antara struktur dan fungsi daur materi tersebut dikarenakan faktor alam atau juga karena ulah manusia. Pada abad modern ini alam digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya, baik itu untuk pembangunan, maupun teknologi sehingga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Sehingga peningkatan kesejahteraan manusia secara tidak langsung dapat menimbulkan pencemaran lingkungan yang perlu dikendalikan.

Sedangkan menurut (Palar, 2008), pencemaran lingkungan merupakan suatu keadaan dimana kondisi asal yang telah berubah menjadi kondisi yang buruk akibat adanya bahan-bahan polutan yang ikut tercampur. Lingkungan dapat dikatakan telah tercemar apabila tatanan lingkungan yang sudah berubah tidak sama lagi dengan bentuk asalnya, hal tersebut akibat dari masuknya suatu zat berbahaya yang masuk ke dalam tatanan lingkungan. Kondisi ini mengakibatkan dampak buruk terhadap makhluk hidup yang ada, lebih lanjut pencemaran lingkungan tersebut dapat membunuh bahkan menghapuskan suatu makhluk hidup. Senada dengan Palar, menurut (Sastrawijaya, 2009), pencemaran lingkungan merupakan

perubahan lingkungan yang tidak menguntungkan, sebagian karena tindakan manusia, disebabkan perubahan pola penggunaan energi dan materi, tingkatan radiasi, bahan-bahan fisika dan kimia, dan jumlah organisme. Perbuatan tersebut dapat mempengaruhi langsung bagi manusia, atau tidak langsung melalui air, hasil pertanian, peternakan, benda-benda, perilaku dalam apresiasi dan rekreasi di alam bebas.

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat diketahui pencemaran lingkungan adalah suatu keadaan lingkungan yang berubah dari keadaan sebelumnya menjadi keadaan yang lebih buruk yang disebabkan oleh baha-bahan polutan yang berbahaya bagi lingkungan. Kemudian kondisi tersebut berdampak negatif bagi makhluk hidup yang mana dapat merusak atau menghapuskan suatu makhluk hidup.

1.7.4.2 Jenis Pencemaran

Menurut (Sastrawijaya, 2009), pencemaran lingkungan berdasarkan tempat terjadinya dapat dibagi menjadi 3 yaitu:

1) Pencemaran tanah

Pencemaran tanah adalah adanya bahan pencemar yang merusak tanah sehingga susunan tanah mengalami perubahan yang pada akhirnya akan mengganggu kehidupan jasad yang hidup di dalam tanah maupun permukaan, pencemaran tanah juga dapat terjadi melalui udara dan air. Udara yang tercemar akan menurunkan hujan yang mengandung bahan polutan yang mengakibatkan tanah ikut

tercemar sedangkan air yang mengandung polutan akan mengubah susunan kimia dalam tanah.

2) Pencemaran Udara

Pencemaran udara ialah jika udara di atmosfer dicampuri dengan zat atau radiasi yang berpengaruh buruk terhadap organisme hidup. Jumlah zat atau radiasi tersebut cukup banyak sehingga tidak dapat di absorpsi atau dihilangkan. Umumnya pencemaran ini bersifat alamiah, misalnya gas pembusukan, debu akibat erosi, kemudian pencemaran udara ditambah oleh aktivitas manusia yang mana jumlah dan kadar bahayanya tinggi. Tanpa pencemaran oleh aktivitas manusia alam biasanya menyediakan unsur-unsur dasar yang diperlukan makhluk hidup dalam jumlah yang cukup dan berkelanjutan. Tetapi karena pencemar yang disebabkan oleh aktivitas manusia maka udara tidak dapat membersihkan dirinya lagi, pencemar udara tersebut tersebar kemana-mana, kepekatannya, kemudian masuk ke dalam air atau tanah dan menambah polusi air ataupun polusi tanah.

3) Pencemaran Air

Pencemaran air adalah masuknya bahan pencemar ke dalam air yang mengakibatkan berubahnya tatanan air sehingga kualitas air menurun pada tingkat tertentu yang mengakibatkan disfungsi air tidak lagi sesuai dengan peruntukannya. Didalam air terlarut zat-zat seperti oksigen, karbondioksida, basa, asam, senyawa nitrogen, senyawa fospor dan berbagai bahan pencemar bergantung kepada

lokasi, suhu dan tekanan, diantara zat tersebut ada yang dapat menyuburkan tanah dan makhluk hidup renik. Pencemaran air dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu bentuk gas, padat dan cair. Sumber pencemar dapat berasal dari limbah domestik maupun limbah pabrik/industri, Apabila air tercemar maka akan merusak zat zat tersebut yang kemudian berdampak pada pada ekosistem.

1.7.5 Limbah Cair

1.7.5.1 Pengertian Limbah Cair

Limbah cair (*waste water*) merupakan buangan yang bersifat kotor yang berasal dari rumah tangga dan juga berasal dari industri, air tanah, air permukaan serta buangan lainnya, dengan demikian air buangan tersebut merupakan sesuatu yang bersifat kotoran umum (Sugiharto, 2014).

Sedangkan menurut (Asmadi, 2012), air limbah atau yang dikenal dengan air buangan merupakan:

- a) Limbah cair atau air buangan adalah cairan buangan yang berasal dari rumah tangga, perdagangan, perkantoran, *industry* maupun tempat-tempat umum lainnya yang biasanya mengandung bahan-bahan atau zat-zat yang dapat membahayakan kesehatan atau kehidupan manusia serta mengganggu kelestarian hidup.
- b) Kombinasi dari cairan atau air yang membawa buangan dari perumahan, institusi, komersial, dan industri bersama dengan air tanah, air permukaan, dan air hujan.

- c) Kotoran dari masyarakat dan rumah tangga, industri, air tanah/permukaan serta buangan lainnya (kotoran umum).
- d) Cairan buangan yang berasal dari rumah tangga, perdagangan, perkantoran, industri maupun tempat-tempat umum lainnya, dan biasanya mengandung bahan-bahan atau zat-zat yang dapat membahayakan kesehatan/kehidupan manusia serta mengganggu kelestarian lingkungan hidup.
- e) Semua air/zat cair yang tidak lagi dipergunakan, sekalipun kualitasnya mungkin baik.

Lebih lanjut limbah cair hotel adalah limbah dalam bentuk cair yang dihasilkan oleh kegiatan hotel yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan (Martono, 2004). Limbah hotel memiliki karakteristik yang berbeda dengan limbah cair rumah tangga, karena potensi limbah tersebut tidak hanya berasal dari kegiatan dapur, tetapi juga kegiatan kantor, kamar hotel, kolam renang dan laundry (Elystia, 2012).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat diketahui limbah cair adalah merupakan sisa buangan dari suatu usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair. Lebih lanjut limbah cair hotel merupakan sisa buangan dari aktivitas perhotelan yang berwujud cair.

1.7.5.2 Karakteristik Limbah Cair

Karakteristik limbah cair dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu berdasarkan karakteristik fisik, karakteristik kimia, karakteristik biologi air limbah, khususnya limbah kegiatan usaha/industry dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.4
Karakteristik Fisik, Kimia dan Biologi Limbah Cair

Karakteristik	Sumber
Fisik : 1. Warna 2. Bau 3. Padatan 4. Temperatur	Limbah domestik, industri, penguraian material organik Dekomposisi air limbah dan limbah industri Limbah domestik, industri, dan erosi tanah Limbah industri dan domestic
Kimia Organik : 1. Karbohidrat 2. Lemak, oil dan pelumas 3. Protein 4. Surfaktan	Limbah industri, komersial dan domestik Limbah industri, komersial dan domestik Limbah industri, komersial dan domestik Limbah industri, komersial dan domestik
Kimia Anorganik : 1. Alkanitas 2. Logam Berat 3. pH 4. Sulfur	Limbah domestik dan infiltrasi air bawah tanah. Limbah industri Limbah domestik, komersial dan industri Limbah domestik, komersial dan industri
Gas : 1. H ₂ S (<i>Hidrogen sulfida</i>) 2. CH ₄ (Methan)	Dekomposisi limbah domestik Dekomposisi limbah domestik
Biologi : 1. Hewan 2. Tumbuhan 3. Bakteri 4. Virus	Aliran limbah terbuka dan instalasi pengolahan Aliran limbah terbuka Pengaliran limbah domestik dan infiltrasi air permukaan Limbah domestik

Sumber: (Suharno, 2012)

Semua karakteristik limbah cair diatas mempunyai hubungan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Sebagai contoh,

temperatur (sifat fisik) akan mempengaruhi aktivitas biologi dalam limbah cair dan jumlah gas yang terlarut dalam limbah cair (Thcobanoglous, 1993).

1.7.5.3 Sumber Limbah Cair

Limbah cair bersumber dari aktivitas manusia dan aktivitas alam: (Muliarta, 2004)

1. Aktivitas Manusia

Aktivitas manusia yang menghasilkan limbah cair sangat beragam jenisnya, sesuai dengan jenis kebutuhan hidup manusia yang juga sangat beragam pula. Ada beberapa jenis aktivitas manusia yang menghasilkan limbah cair, diantaranya:

- a) Aktivitas bidang rumah tangga,
- b) Aktivitas bidang perkantoran,
- c) Aktivitas bidang perdagangan,
- d) Aktivitas bidang perindustrian,
- e) Aktivitas bidang pertanian,
- f) Aktivitas bidang pelayanan jasa,

2. Aktivitas Alam

Aktivitas alam yang menghasilkan limbah cair adalah hujan yang disebut air larian (*storm water runoff*). Air larian yang jumlahnya berlebihan sebagai akibat dari hujan yang turun dengan intensitas tinggi dan dalam waktu yang lama dapat menyebabkan terjadinya banjir.

1.7.5.4 Sumber Limbah Cair Hotel

Limbah cair perhotelan adalah limbah dalam bentuk cair yang dihasilkan oleh kegiatan hotel yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan, kondisi tersebut disebabkan karena aktivitas yang ada di hotel relatif sama dengan seperti pada pemukiman dan fasilitas tambahan lainnya yang ada di hotel (Malonggi, 2017).

Limbah hotel yang dihasilkan apabila tidak diolah dengan baik akan menimbulkan dampak kerusakan pada lingkungan perairan, lingkungan darat, maupun lingkungan udara. Hal tersebut dikarenakan limbah hotel memiliki konsentrasi bahan pencemar yang relatif tinggi. Untuk meminimalkan dampak negative yang ditimbulkan akibat pencemaran, setiap manajemen hotel diwajibkan memiliki suatu sistem pengelolaan limbah dengan mekanisme yang baik sebelum limbah tersebut dibuang ke lingkungan (Malonggi, 2017).

Sumber limbah cair pada perhotelan berasal dari : (Muliartha, 2004)

- 1) Limbah dari kamar mandi dan toilet
- 2) Limbah dari kegiatan di dapur atau restoran
- 3) Limbah dari kegiatan pencucian/*laundry*
- 4) Limbah dari fasilitas kolam renang.

Adapun limbah cair yang dihasilkan oleh hotel dapat diidentifikasi dari sumber-sumbernya, dalam hal ini adalah unit proses antara lain: (Malonggi, 2017)

1) Kamar mandi dan toilet umum

Terdiri dari atas air buangan yang dihasilkan dari kamar mandi dan toilet berupa air sabun dan buangan air yang mengandung kotoran manusia, Jumlah pengunjung hotel dan karyawan hotel berpengaruh terhadap buangan limbah cair yang dihasilkan.

2) Binatu (*Laundry Area*)

Dalam proses pencucian digunakan beberapa bahan seperti detergen, bahan pemutih dan pengharum pakaian. Semua itu akan menghasilkan air buangan yang disebabkan detergen, bahan pemutih dan bahan pengharum tersebut.

3) Dapur (*Kitchen Area*)

Terdiri atas air buangan yang dihasilkan di dapur berasal dari proses pengolahan makanan, dan proses pencucian sisa makanan yang mengandung minyak dan lemak.

4) *Mechanical* dan *Electrical Area*

Berasal dari kegiatan pada area ini menghasilkan limbah berupa tumpahan oli dan bahan bakar dari generator/genset.

1.7.5.5 Dampak Limbah Cair Perhotelan

Limbah cair perhotelan adalah limbah dalam bentuk cair yang dihasilkan oleh kegiatan hotel yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan. Kondisi tersebut disebabkan karena aktivitas yang ada di hotel relatif sama dengan seperti pada pemukiman dan fasilitas tambahan lainnya yang ada di hotel (Malonggi, 2017). Air yang sudah tercemar juga dapat

mengganggu ekosistem alam. Limbah cair yang mengotori air bisa membunuh bakteri-bakteri baik yang memiliki fungsi menjernihkan air. Selain itu, tumbuhan dan makhluk hidup yang tinggal di air pun turut terbunuh akibat oksigen yang semakin menipis di dalam air dan tingginya zat kimia yang terkandung dalam air (Boyd, 2014).

Secara umum air limbah hotel dapat menimbulkan berbagai dampak yang cukup merugikan bagi manusia. Dampaknya dapat menyebabkan atau menimbulkan penyakit. Potensi bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan limbah cair hotel adalah sebagai berikut:

1) Penyakit diare dan tipus

Penyakit ini terjadi karena virus yang berasal dari sampah dengan pengelolaan yang tidak tepat.

2) Penyakit kulit (kudis dan kurap)

Cairan dari limbah yang masuk ke sungai akan mencemarkan airnya sehingga mengandung virus-virus penyakit, berbagai ikan dapat mati sehingga mungkin lama kelamaan akan punah, tidak jarang manusia juga mengkonsumsi atau menggunakan air untuk kegiatan sehari-hari, sehingga manusia akan terkena dampak limbah baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ciri khusus akibat dampak limbah cair bagi kesehatan yaitu proses penularan yang umumnya melalui mulut, dikarenakan limbah cair hotel mengandung bakteri pathogen seperti E.coli maka ada beberapa penyakit yang paling sering terjangkiti antara lain,

yaitu *Disentri, Tifus dan Paratifus, Kholera, Hepatitis A, Poliomyelitis Anterior Akut* (Malonggi, 2017).

Pengolahan limbah cair hotel sangat penting untuk mengurangi penyebaran penyakit menular yang disebabkan oleh organisme patogen dalam limbah dan untuk mencegah pencemaran air permukaan dan air tanah. Perlakuan air limbah dilakukan oleh kombinasi dari unit proses fisik, kimia dan biologi, sebelum limbah cair dibuang dengan aman ke lingkungan (Sadi, 2014).

1.8 Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

1.8.1 Definisi Konseptual

Definisi konseptual dari penelitian ini digunakan untuk menggambarkan secara jelas terkait permasalahan yang akan diteliti. Adapun konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh birokrat kepada penerima kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang dibuat oleh pembuat kebijakan.

2) Eksternalitas

Eksternalitas merupakan dampak dari suatu tindakan pihak tertentu kepada pihak lain baik dampak yang menguntungkan atau yang merugikan

3) Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan adalah suatu keadaan lingkungan yang berubah dari keadaan sebelumnya menjadi keadaan yang lebih buruk yang disebabkan oleh baha-bahan polutan yang berbahaya bagi lingkungan. Kemudian kondisi tersebut berdampak negatif bagi makhluk hidup yang mana dapat merusak atau menghapuskan suatu makhluk hidup.

4) Limbah Cair

Limbah cair merupakan sisa atau buangan dari suatu usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair

1.8.2 Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan pendekatan implementasi kebijakan publik pendekatan model Riant Nugroho dengan indikator sebagai berikut:

Tabel 1.5
Definisi Operasional

Variabel	Indikator dan Sub Indikator
-----------------	------------------------------------

Implementasi Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar dan sasaran kebijakan <ol style="list-style-type: none"> a. Realistis atau utopis diukur dari tingkat pelaksanaan dan hasil 2. Sumber daya <ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah staff b. Kualitas staff c. Anggaran d. Sarana dan prasarana 3. Karakteristik organisasi pelaksana <ol style="list-style-type: none"> a. Prosedur-prosedur kerja standar (SOP) b. Fragmentasi 4. Komunikasi antar-organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan <ol style="list-style-type: none"> a. Komunikasi akurat b. Koordinasi antar organisasi yang terlibat 5. Sikap para pelaksana <ol style="list-style-type: none"> a. Komitmen pelaksana 6. Lingkungan eksternal <ol style="list-style-type: none"> a. Lingkungan sosial, ekonomi, politik mendukung/menolak
------------------------	--

1.9 Metodologi Penelitian

Metodologi merupakan suatu cara untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama guna mencapai tujuan-tujuan (Narbuko, 2007). Metodologi penelitian berupa seperangkat cara yang sistematis, logis dan rasional yang digunakan oleh peneliti ketika merencanakan, mengumpulkan, menganalisa dan menyajikan data untuk menarik kesimpulan (Hamid, 2007).

Berdasarkan pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa metodologi penelitian adalah merupakan syarat yang harus dikuasai oleh

peneliti bila ingin melakukan penelitian, karena dengan penguasaan hal itu maka akan memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian karena dapat memberikan petunjuk, arah serta sasaran yang jelas tentang apa yang akan diteliti.

1.9.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut (Moleong, 2011), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, kemudian penelitian metode deksriptif menurut (Nariwati, 2008), merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian akan tetapi tidak sampai untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Berdasarkan pemaparan diatas penelitian kualitatif deksriptif bertujuan untuk mengetahui apa saja fenomena yang dialami oleh subjek penelitian dan hasilnya digambarkan dan dianalisis tapi tidak sampai membuat suatu kesimpulan yang luas.

Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam pengendalian limbah cair hotel di Kota Yogyakarta secara lebih mendalam.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis mengambil lokasi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Alasan penulis mengambil lokasi di

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta karena di Kota Yogyakarta sangat banyak berdiri hotel-hotel bintang maupun non bintang yang menghasilkan limbah cair, kemudian Dinas Lingkungan Hidup merupakan salah satu stakeholder yang berwenang dalam pengendalian limbah cair.

1.9.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian melalui wawancara dengan pejabat/staff Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Sedangkan data sekunder merupakan data yang didapat dari kajian-kajian sumber yang digunakan sebagai penunjang data primer dalam menganalisa masalah-masalah yang akan diteliti berupa peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang dikeluarkan pemerintah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang akan diteliti.

Berikut ini adalah data-data yang akan digunakan dalam penelitian ini :

Tabel 1.6
Data Primer

No.	Nama Data Primer
1.	Hasil wawancara Pejabat/Staff Dinas lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Tabel 1.7
Data Sekunder

No	Nama Data Sekunder
1.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup
2.	Peraturan Gubernur DIY Nomor 7 tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah

4.	Renstra
5.	LAKIP
6.	Buku Statistik Pariwisata Kota Yogyakarta
7.	Buku Profil Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder, karena kedua data tersebut saling berhubungan dan melengkapi satu sama lain yang sangat dibutuhkan dalam penelitian ini.

1.9.4 Unit Analisis Data

Dalam penelitian ini mengkaji tentang implementasi kebijakan pengendalian limbah cair hotel yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta pada tahun 2017, maka unit analisis data dalam penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data penelitian, adapun teknik-teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.9.5.1 Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara secara langsung kepada subyek atau narasumber, tujuannya untuk mendapatkan informasi ataupun keterangan yang lebih jelas tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan masalah implementasi pengendalian pencemaran limbah cair hotel. Adapun jenis wawancara

yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis wawancara semi terstruktur, artinya penulis membuat jadwal wawancara dan daftar pertanyaan wawancara sebagai pedoman akan tetapi pertanyaan yang diajukan bersifat fleksibel tidak harus sama persis dengan pedoman sehingga tidak menutup kemungkinan ada variasi atau improvisasi pertanyaan yang sesuai dengan kebutuhan informasi atau data yang ingin didapatkan oleh pewawancara.

Pada tahapan wawancara subyek wawancara yang dipilih oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Tabel 1.8
Narasumber

No	Nama Narasumber	Instansi/Jabatan
1.	Ir. Budi Raharjo	Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
2.	Very Tri Jatmiko, S.Si., MM	Very selaku Kepala Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup Dnas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
3.	Pramu Haryanto, ST	Staff Seksi Pemantauan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
4.	Bapak Dahri	Warga

1.9.5.2 Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian, dokumen-dokumen dapat berupa peraturan perundang-undangan.

1.9.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data dengan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian yang bersifat menuturkan dan menafsirkan data yang diperoleh tetapi tidak sampai pada penalaran. Proses penalaran data dan analisis berlangsung selama pasca pengumpulan data. Proses analisis mengalir dari tahap awal hingga tahap penarikan kesimpulan hasil studi. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, dokumentasi dan observasi untuk memperoleh keabsahan penelitian. Analisis data kualitatif sebagai model alir (*flow model*), sehingga analisa data kualitatif ini terdiri dari pengumpulan data kemudian di reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi.

1.9.6.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mencari data dilapangan dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi.

1.9.6.2 Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penyederhanaan data-data kasar yang diperoleh dari pengumpulan data di lapangan. Reduksi data dilakukan dengan membuat ringkasan data atau inti data.

1.9.6.3 Penyajian Data

Penyajian data menggambarkan situasi keadaan yang sesuai dengan data yang sudah direduksi kemudian disajikan kedalam laporan yang sistematis.

1.9.6.4 Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari data yang telah diperoleh dan data yang sudah tereduksi dalam bentuk laporan dengan membandingkan data-data tersebut terhadap permasalahan-permasalahan penelitian, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang bersifat valid.